

ABSTRAK

Sisma Ainun Nur Fauziah : Transformasi Fiqih Madzhab Syafi'i Kedalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina

Telah terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang menikahi wanita hamil karena zina, seperti halnya Imam Syafi'i berpendapat boleh menikahi wanita hamil tersebut dan hukumnya sah, Imam Maliki berpendapat menikahi wanita hamil karena zina tersebut diharamkan secara mutlak, Imam Hanafi berpendapat boleh menikahi wanita hamil tersebut, Imam Hanbali diperbolehkan menikahi wanita hamil tersebut dengan syarat menyelesaikan masa iddah dan taubat atas perbuatannya.

Penelitian ini bertujuan : 1). Untuk mendeskripsikan kedudukan hukum perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i. 2). Untuk mendeskripsikan kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 53. 3). Untuk menganalisis transformasi kedudukan perkawinan wanita hamil karena zina menurut Madzhab Syafi'i kedalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Teori legislasi yang dikemukakan bahwa hukum yang hidup di masyarakat dan dianut oleh sebagian masyarakat dapat di transformasikan menjadi qanun baik berupa Undang-undang / Peraturan Pemerintah / Instruksi Presiden yang di tetapkan oleh otoritas pemerintah karena kepentingan yang mendesak. Proses transformasi itu dikenal dengan legislasi.

Penelitian yang digunakan penulis merupakan penelitian normatif atau penelitian pustaka, penelitian pustaka yaitu mengumpulkan data-data atau bahan-bahan yang dijadikan acuan sebagai terkumpulnya sebuah informasi, data-data yang dibutuhkan yaitu berasal dari berbagai macam buku maupun kitab dan juga berbagai macam hasil penelitian lainnya. Metode penelitian hukum normatif ditujukan pada peraturan-peraturan yang ditulis dan penelitian ini sangat relevan dengan perpustakaan. Pendekatan dalam penelitian ini maka penulis menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Pandangan Madzhab Syafi'i memperbolehkan menikahi wanita hamil karena zina baik dengan yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. 2). Dalam KHI Pasal 53 menjelaskan bahwa boleh boleh menikahi wanita hamil tersebut akan tetapi dipasal ini tidak menjelaskan bagaimana hukumnya jika dikawinkan dengan selain yang menghamilinya. 3). Pandangan Imam Syafi'i dan KHI Pasal 53 terdapat kesamaan dalam menentukan hukum perkawinan wanita hamil ini, maka patut di duga telah terjadi transformasi dari pendapat Imam Syafi'i kedalam KHI Pasal 53. Hal ini dikarenakan mayoritas muslim yang ada di Indonesia banyak menggunakan Madzhab Syafi'i.